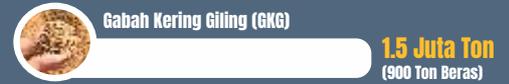


- 02** GOVERNMENT TODAY  
Gedung Kementerian ATR/BPN Terbakar  
Barang Bukti Abu Arang Ditemukan di Lokasi
- 04** NUSANTARA  
Prabowo Restui Buka Keran Impor Pupuk
- 08** FAMILY  
Hobi Nonton Maraton? Waspadai Dampaknya!

## RENCANA PENYERAPAN BERAS 2025

Data Bulog, 13 Januari 2025



**BERAS : 1.5 JUTA TON**

## STOK BERAS DALAM NEGERI

Data Bulog, 13 Januari 2025



# Gonta Ganti Bos Bulog di Tengah Target 3 Juta Ton Beras



**D**irektur Utama Perum Bulog kerap berganti di era Menteri BUMN, Erick Thohir. Terbaru, pada 7 Februari 2025 ternyata Wahyu Suparyono yang menjabat per 10 September 2024 sudah diganti. Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025, Wahyu digantikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. Prajurit TNI aktif yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Usai diangkat, Minggu (9/2/2025), Mayjen Novi langsung melakumkan rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Salah satu tugas besar sebagai bos Bulog adalah dapat membeli harga gabah petani Rp 6.500/kg dan juga bisa menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025. Hingga saat ini, Bulog diketahui baru menyerap 45.000 ton beras dalam negeri. Memang ada deretan nama prajurit di Bulog. Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marga Taufiq sudah lebih dulu menduduki jabatan wakil direktur utama yaitu 10 September 2024. Selanjutnya, dikutip dari laman resmi Bulog, purnawirawan TNI yang juga menduduki jabatan strategis adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Arifin Seman. Arifin ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Bulog terhitung sejak 17 Juli 2024. Kemudian, purnawirawan TNI selanjutnya yang menjabat di Bulog adalah Inspektur Jenderal (Purn) Andi Geerhan Lantara. Andi menjabat sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Bulog terhitung sejak 17 Juli 2024.

Baca Hal 11....

### Harga di tingkat pedagang eceran per Minggu (9/2/2025)

- Beras kualitas bawah I: **Rp14.000 per kg**
- Beras kualitas bawah II: **Rp13.800 per kg**
- Beras kualitas medium I: **Rp15.300 per kg**
- Beras kualitas medium II: **Rp15.200 per kg**
- Beras kualitas super I: **Rp16.650 per kg**
- Beras kualitas super II: **Rp16.200 per kg**



**MAYJEN TNI  
NOVI HELMY PRASETYA**

# Gedung Kementerian ATR/BPN Terbakar Barang Bukti Abu Arang Ditemukan di Lokasi



Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri melakukan olah TKP setelah kebakaran terjadi di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025) malam.ist

**JAKARTA-** Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa abu arang di lokasi kebakaran salah satu ruangan di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Barang bukti tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.

Kapuslabfor Polri Brigjen Sudjarwoko menyebut pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan abu arang dengan tekstur beragam, mulai dari halus seperti tepung hingga bongkahan kecil.

"Ada beberapa barang bukti yang kami kumpulkan berupa abu arang, nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik," ujarnya di lokasi, Minggu (9/2/2025).

Selain abu, ditemukan pula sisa-sisa kertas dan kayu yang terbakar.

"Kalau yang di abu itu ya bercampur, ada yang kertas yang terbakar, ada yang kayu terbakar, karena meja yang saya lihat di dalam itu meja dari polyflex, seratnya itu dari serbuk, jadi mudah terbakar," kata Sudjarwoko.

Terkait dugaan dokumen yang terbakar, ia menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah itu dokumen penting atau bukan.

"Saya rasa kalau dokumen penting tidak mungkin diletakkan di atas meja tergeletak seperti itu," tambahnya.

Hingga saat ini, Sudjarwoko

menyebut penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan.

"Untuk penyebab kebakaran, sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan. Tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di Labfor, itu baru kita bisa tentukan penyebab kebakarannya apa," jelasnya.

Kebakaran terjadi di gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23.10 WIB, Sabtu (8/2/2025).

Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api.

## Bukan Penghilangan Barang Bukti

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan kebakaran di kantor Kementerian ATR/BPN bukan upaya penghilangan barang bukti dari masalah pertanahan yang terjadi.

"Yang terbakar itu bagian Humas. Di sana tak ada dokumen HGB, HGU, atau apa pun. Jadi tak ada namanya penghilangan barang bukti," tegas Nusron, Minggu (9/2/2025).

Kebakaran terjadi di ruangan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN. Ruangan yang terletak di lantai 1 kementerian ini berhasil dipadamkan dengan cepat oleh tim pemadam kebakaran (Damkar).

Nusron Wahid yang hadir langsung ke lokasi untuk memastikan keadaan pasca kebakaran mengapresiasi reaksi cepat dari Tim Damkar.

"Kejadiannya cepat sekali, sekitar jam 23 lewat, ada kebakaran kecil di Biro Humas lantai 1. Alhamdulillah,

reaksinya cepat sekali, sehingga bisa dipadamkan," ujar Nusron.

Atas reaksi yang cepat dari pemadaman api, selain kepada Tim Damkar, Nusron juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Jakarta Selatan.

Nusron Wahid menduga, penyebab kebakaran di kantor Biro Humas Kementerian ATR/BPN berasal dari perangkat komputer yang tidak dimatikan.

Sementara itu, Plt Kadis Sudin Gulkarmat Jakarta Satriadi menduga, penyebab kebakaran berasal dari korsleting AC di ruangan tersebut. "Diduga korsleting perangkat AC,"katanya.

Adapun kerugian yang ditaksir dari insiden kebakaran ini sebesar Rp 448.656.000. Area yang terbakar seluas 8 meter x 6 meter = 48 meter kubik. Merujuk data resmi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Selatan gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar ini beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Karena insiden yang membuat publik heboh ini juga dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini terkait pagar laut.

Salah satu netizen di media sosial X membuat cecoklogi insiden terbakarnya gedung kementerian ATR/BPN situasinya hampir sama dengan Gedung Kejaksaan Agung.

"Gedung Kejaksaan Agung terbakar wkt heboh kasus besar, sekarang Gedung ATR/BPN terbakar lagi heboh kasus PIK2/Aguan, kebetulan ?? Rakyat Monitor @prabowo @NusronWahid1," tulis

## DERETAN KASUS VIRAL YANG TENGAH DITANGANI OLEH KEMENTERIAN ATR/BPN

### 1. Pagar Laut

Polemik pemagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten hingga saat ini masih terus bergulir. Proses investigasi masih terus dilakukan untuk mengetahui siapa dalang di baliknya. Adapun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah mencopot enam orang pegawai pertanahan terkait dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang.

### 2. Mafia Tanah

Mafia tanah masih menjadi isu yang perlu ditangani. Nusron pada November 2024 bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024). Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah.

### 3. SHM tanah perumahan Tambun

Terbaru, mengenai praktik penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ganda yang ada di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk diketahui sebelumnya, ramai di media sosial para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 melakukan demonstrasi lantaran huniannya digusur oleh PN Cikarang. Adapun, pengusuran hunian masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni mengaku menggenggam SHM resmi yang telah didapat selama 30 tahun lamanya.

cuitan akun @Linda09645907.

Gedung Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanudin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu (22/8/2020) lalu.

Kebakaran tersebut berlangsung selama hampir 11 jam dan baru berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan area gedung pada Minggu (23/8/2020) sekitar pukul 06.28 WIB.

Kebakaran gedung Kejagung ini sempat menimbulkan spekulasi di masyarakat, yang mengaitkan dugaan keterlibatan seorang jaksa dalam eksekusi kasus korupsi Djoko Tjandra.(qid, din, ant, rls/dya)



**Segenap Pimpinan dan Staf DPRD  
Kota Surabaya Mengucapkan**

**Selamat Hari**

**PERS NASIONAL**

09 FEBRUARI 2025

**HPN**  
HARI PERS  
NASIONAL  
KALIMANTAN SELATAN  
2025



**Pers  
Mengawal  
Ketahanan  
Pangan  
untuk Kemandirian  
Bangsa**



**Adi Sutarwijono**

Ketua DPRD Kota Surabaya

**Bahtiar Rifai**

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

**Laila Mufidah**

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

**Arif Fathoni**

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

# Prabowo Restui Buka Keran Impor Pupuk



(Ilustrasi) Pupuk organik mendukung pertanian ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia yang merusak.

**JAKARTA** - Presiden Prabowo Subianto baru saja meneken aturan baru soal pupuk subsidi. Dalam aturan itu, pemerintah mengizinkan pemenuhan pengadaan pupuk subsidi di Indonesia bisa dilakukan dengan impor dari luar negeri.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi yang diteken sejak 30 Januari 2025. Aturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan agenda besar ketahanan pangan yang disebut Prabowo.

Prabowo memberikan titah pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi lewat penugasan Menteri BUMN kepada perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor pupuk.

BUMN tersebut diwajibkan menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan secara nasional berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka juga wajib menyampaikan rencana pengadaan pupuk subsidi kepada pemerintah.

Nah dalam rangka pengadaan pupuk subsidi tersebut, Prabowo mengizinkan BUMN pupuk menyiapkan pupuk dari dalam maupun dari luar negeri. Hanya saja, pengadaan lewat luar negeri alias impor baru bisa dilakukan apabila BUMN pupuk tak mampu memenuhi kebutuhan dari dalam negeri.

Keputusan boleh impor itu pun harus ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin menteri

koordinator di bidang pangan dengan usulan impor yang disampaikan menteri teknis di sektor pertanian atau perikanan.

"Pengadaan Pupuk Bersubsidi dari luar negeri dilakukan dalam hal BUMN Pupuk tidak dapat kebutuhan Pupuk Bersubsidi," bunyi pasal 11 ayat 2 beleid tersebut dikutip Minggu (9/2/2025).

BUMN pupuk juga bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk subsidi hingga ke Titik Serah. Mulai dari gabungan kelompok pertanian (gapoktan), kelompok usaha di bidang perikanan (pokdakan), pengecer, dan atau koperasi yang bergerak pada usaha penyaluran pupuk.

Masih dalam aturan yang sama, BUMN pupuk disebut baru bisa melakukan penagihan pupuk subsidi setelah barang yang sudah disalurkan di titik serah telah ditebus oleh petani, kelompok tani, pembudidaya ikan, dan kelompok budidaya ikan. Penagihan juga baru bisa dilakukan setelah penyaluran diverifikasi oleh kementerian di sektor pertanian dan perikanan.

## Subsidi untuk Pupuk Organik

Kabar baiknya, jenis pupuk subsidi diperluas dengan memasukkan pupuk organik. Dalam beleid tersebut disebutkan jenis pupuk subsidi ada lima. Mulai dari pupuk urea, pupuk

NPK, pupuk SP 36, pupuk ZA, dan yang terakhir baru dimasukkan dalam jajaran barang subsidi adalah pupuk organik.

"Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Pupuk SP 36, dan Pupuk ZA," tulis pasal 6 ayat 1 beleid tersebut.

Perubahan terhadap jenis pupuk subsidi yang terjadi pada aturan ini sudah ditetapkan oleh menteri teknis pertanian berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh menteri koordinator.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi akan menasar untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan juga diberikan untuk pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok budidaya ikan.

"Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan atau disebut dengan nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 7 ayat 2.

Penetapan pupuk bersubsidi dilakukan paling sedikit meliputi sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi, dan ketersediaan stok. (din, wwid, ist/dya)

## Koalisi Masyarakat Sipil Minta KUHP Dirombak Total

**JAKARTA**-Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, LBH Masyarakat, hingga BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) mendesak agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dirombak total. KUHP dinilai tak layak lagi untuk dipertahankan.

DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas tahun 2025

"Diganti, diganti total," kata Anggota LBH Masyarakat, Maruf Bajammal, di Kantor LBH Jakarta pada Minggu (9/2/2025).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat total 177 pasal dalam KUHP tahun 1981 yang tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Koalisi Masyarakat Sipil pun menyebut 8 poin materi yang perlu diatur dalam pembaruan KUHP.

Maruf menyebut, KUHP yang merupakan produk Orde Baru pada tahun 1981 harus dirombak dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Belakangan ini, lanjut dia, begitu banyak korban dari kelompok rentan yang kesulitan mendapatkan keadilan akibat KUHP.

"Tujuan utama yang ingin kami ajukan adalah memperkuat due process of law, yang kemudian menjamin perlindungan terkait dengan hak asasi manusia kita semua, setiap warga masyarakat, setiap rakyat Indonesia," ucap dia.

Di lokasi yang sama, Anggota LBH Jakarta, Belly Stanio, menyebut beberapa contoh kasus yang menjadi bukti ketidakadilan terhadap kelompok rentan. Beberapa waktu lalu, dia mengaku pernah mengunjungi Rutan Khusus Perempuan di Pondok Bambu.

Di sana, Belly bertemu seorang ibu yang ditahan terkait dengan kasus pencurian. Ibu itu ditetapkan menjadi tersangka karena dinilai terlibat

dengan menyewakan mobilnya kepada komplotan pencuri. Padahal, ibu itu tidak mengetahui mobilnya yang disewakan digunakan untuk mencuri.

"Salah ibu apa? Ibu cuma punya mobil, ibu rentalkan ke orang, ibu gak tau kan mobilnya dipakai untuk mencuri?" kata dia.

Kemudian, contoh kasus lainnya yakni terkait kasus pesta gay yang digelar di sebuah penginapan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Menurut Belly, 56 pria yang diamankan mendapat perlakuan sewenang-wenang oleh anggota kepolisian. Mereka dipaksa untuk melepas pakaiannya usai diamankan.

"Makanya enggak heran kalau ternyata kondisi sosial di masyarakat



Konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil terkait KUHP di LBH Jakarta, Minggu (9/2/2025). Ist

kita lebih tinggi itu percuma lapor polisi. No viral, no justice," kata dia.

Belly menyebut, Koalisi Masyarakat Sipil bakal mengirim surat terbuka untuk Komisi III DPR RI pada Senin (10/2/2024) yang berisi tuntutan agar dilakukan perombakan total atas KUHP.

"Jadi kita besok akan menyampaikan surat terbuka langsung ke Komisi III DPR," kata dia. (qud, rls/dya)

# Retreat Kepala Daerah 21-28 Februari di Akmil, Sultan Hamengku Buwono X Tak Ikut

**YOGYAKARTA**—Ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pembekalan atau retreat di Akmil, Jawa Tengah pada 21 Februari sampai 28 Februari mendatang. Sebelumnya, mereka akan dilantik di Jakarta pada 20 Februari.

Dikabarkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) tidak akan mengikuti pembekalan

"Di Magelang-nya insyaallah sampai tanggal 28 ya. 7 hari. 21 sampai 28. 21 itu masuk sana, check in di Magelang," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya saat mengecek Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Minggu (9/2/2025).

Gedung Agung direncanakan akan menjadi titik kumpul ratusan kepala daerah sebelum bersama-sama menuju Akmil menggunakan bus.

Bima Arya mengatakan 505 kepala daerah yang ikut retreat ini adalah mereka yang tidak ada gugatan atau sudah selesai gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu yang tidak ada gugatan di MK

dan yang dismissal jadi jumlah 505. Yang tidak lanjut perkara di MK itu ada 505," bebernya.

"Sisanya nanti akan dilakukan sesuai dengan keputusan MK. Ya, nanti kan MK memutuskan mungkin berbeda-beda ya tergantung kasusnya. Nanti akan ditentukan lagi," jelasnya.

Pemilihan Akmil sebagai lokasi retreat kepala daerah menurut Bima Arya karena Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan tempat tersebut sebagai lokasi pembekalan para pimpinan.

"Ya, karena memang sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan dimulai dari kabinet Merah Putih di sana karena sudah ada tempatnya," bebernya.

Dengan kembali dipilihnya Akmil menurut Bima Arya anggaran jauh lebih efektif dan efisien.

"Jadi, dari pada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih lebih efektif efisien di situ

saja, karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri begitu ya di sana," bebernya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) tidak akan mengikuti pembekalan atau retreat bersama dengan ratusan kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Bima pun membeberkan alasan Sultan HB X absen dalam acara itu.

"Nggak (ikut), Ngarsa Dalem (Sultan) itu kan sedang bertugas, sudah dilantik, masa jabatannya juga masih sampai tahun 2027 kalau tidak salah, ya," kata Bima Arya.



Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengecek Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Minggu (9/2/2025). Ist

Meski Sultan tak ikut retreat, Bima Arya berharap Raja Keraton Yogyakarta bisa ikut kebersamaan di Gedung Agung. "Tapi mudah-mudahan Ngarsa Dalem juga berkenan kebersamaan nanti ketika misalnya diskenariokan berkumpul di sini," katanya. (wid, rls, ant/dya)

## Antisipasi Kebijakan Salah, DPR Minta Bahlil Simulasikan Penertiban Solar Subsidi



(Ilustrasi) Solar subsidi dikatakan bakal ditertibkan agar tepat sasaran di masyarakat.ist

**JAKARTA**—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku berencana untuk menertibkan distribusi solar subsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengingatkan agar Bahlil Lahadalia melakukan simulasi.

Tifatul mengatakan, pada prinsipnya ia sepakat bahwa BBM bersubsidi memang harus diberikan

kepada wartawan, dikutip Minggu (9/2/2025).

Tifatul menyarankan agar Bahlil membuat simulasi terlebih dahulu dan menganalisis apa dampak dari penertiban distribusi solar subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Nah ini kan kita bukan berperang, bukan dalam kondisi berperang terus

secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi dalam penanganannya, menurut Tifatul, tidak bisa dilakukan tiba-tiba dan dipukul rata.

Ia memandang penertiban distribusi solar subsidi secara mendadak justru bakal mengorbankan masyarakat.

"Nah itu kan tidak bisa dipukul rata begitu. Ya akibatnya yang menjadi korban yang di bawah ya, yang antre ini," kata Tifatul dalam keterangannya

mengeluarkan slogan-slogan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Ini bukan urusan itu bos. Ini kebijakan publik," kata Tifatul.

"Menteri ini digaji untuk mengelola pemerintahan. Jadi harus bijak dalam bercakap dan mengeluarkan narasi gitu loh," ujarnya.

Tifatul meminta pemerintah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya imbas dari kebijakan serupa. Ia mencontohkan ihwal kasus kelangkaan minyak goreng.

Diketahui, rencana itu diungkapkan di tengah usaha Bahlil menata ulang penyaluran LPG 3 kg yang juga sempat memicu kelangkaan. Ia menjelaskan solar subsidi perlu diterbitkan agar tepat sasaran di masyarakat.

"Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar," ujar Bahlil dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil mengungkapkan solar subsidi masuk sorotan karena penyalurannya masih belum tepat sasaran.

Ia juga tidak menampik rencana tersebut berisiko memantik keributan seperti ketika awal mengatur penyaluran LPG 3 kg. Meski begitu, ia menyatakan tidak khawatir jika harus menghadapi situasi serupa kembali.

"Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa," ujar Bahlil.

"Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua," sambungnya.

Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar tak luput mendorong kader-kadernya agar ikut mendukung kebijakan tersebut.

Pemerintah tengah menata penyaluran LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan harganya tidak terlalu liar. Salah satunya dengan cara menghapus rantai distribusi tingkat paling bawah atau pengecer karena ditemukan banyak permainan harga.

Dengan penghapusan pengecer, maka masyarakat hanya bisa membeli LPG 3 Kg di pangkalan atau agen resmi. Namun, sekitar 3 hari berjalan atiran itu dibatalkan Presiden Prabowo. (Wid, rls, isr/dya)

# Pemkab Klaim Jalan Rusak di Kabupaten Malang Tersisa 20 Persen

**MALANG** - Pemerintah Kabupaten Malang mengungkap berdasarkan hasil survei Provincial and Kabupaten Road Management System (PKRMS), saat ini total jalan rusak di wilayahnya hanya tersisa sekitar 20 persen dari total panjang jalan 1.668,7 kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, mengungkapkan persentase tersebut mencakup jalan dengan kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan perbaikan, terutama di ruas-ruas yang memiliki lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.

"Makanya kami juga akan panggil teman-teman untuk mengeksekusi secepatnya jalan yang rawan. Sebenarnya sudah kami instruksikan, jalan yang LHR nya itu tinggi, kecepatan tinggi, jangan ada yang berlubang," ujar pria yang akrab dengan sapaan Oong ini, Minggu (9/2/2025).

Oong mengaku telah menginstruksikan agar perbaikan jalan dapat menggunakan material hotmix. Namun, jika dalam kondisi tertentu anggaran untuk hotmix

belum tersedia atau terdapat kendala dalam pengadaan material, pihaknya menyebut akan menggunakan metode alternatif dengan salop untuk menutup lubang-lubang di jalan agar tetap aman dilalui oleh pengendara.

"Kalau memang sudah direncanakan dengan anggaran hotmix segera dikerjakan. Tetapi kalau tidak ada, kami instruksikan pakai salop biar tidak terlalu lama jalan berlubang yang dibiarkan tanpa penanganan," tambahnya.

Oong menyampaikan beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas dalam perbaikan di antaranya Jalan Kreet, Gondanglegi, Kendalpayak hingga Kepanjen, serta Jalur Lingkar Barat (Jalibar) yang memiliki tonase kendaraan besar.

Untuk memastikan seluruh proyek berjalan efektif, Dinas PU Bina Marga menerapkan skema pengerjaan bertahap per triwulan. Pada triwulan pertama 2025 ini, ditargetkan sekitar 20-25 persen pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan akan rampung.

Lebih lanjut, Oong menyatakan salah satu proyek strategis yang tengah berjalan saat ini, yaitu rehabilitasi Jalibar. Proses perbaikan

menurutnya telah dimulai sejak Januari 2024, tetapi masih dalam tahap trial atau uji coba untuk memastikan spesifikasi yang digunakan oleh pihak ketiga sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Saat ini kami menunggu hasil uji laboratorium. Kalau hasilnya sudah keluar dan sesuai standar, baru kami lanjutkan eksekusinya," jelasnya.

Selain rehabilitasi jalan, Pemkab Malang juga fokus pada penanganan genangan air yang kerap menjadi penyebab utama kerusakan jalan di Jalibar. Pembuatan sudetan untuk mengalirkan air dari titik-titik yang sering tergenang, sambungnya, merupakan salah satu solusi yang tengah dikaji saat ini.

"Ada usulan untuk membuat sudetan, tetapi itu harus dikoordinasikan dengan Cipta Karya



Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kabupaten Malang. (dok. istimewa)

karena memerlukan surat resmi. Kalau harus membangun drainase, biayanya besar karena butuh pembebasan lahan," terangnya.

"Kalau dari hitungan anggaran lebih masuk ke pengecoran, ya kami cor. Daripada membangun drainase panjang yang bisa menghabiskan anggaran luar biasa besar," imbuh Oong. (Santi/Dya)

## PAD 2025 Ditargetkan Rp 846 M, Bapenda Kota Malang Optimistis Bisa Melampaui



(Ilustrasi) Parkir sebagai salah sumber pendapatan pajak daerah Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

Anggaran Keuangan (PAK) nanti.

Handi mengatakan, penetapan target ini didorong oleh tambahan potensi pajak dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Tahun 2025 ini ada tambahan potensi Rp 184 miliar dari opsen PKB dan BBNKB. Semua pajak yang terpasang juga sudah melalui kajian potensi, sehingga kami optimis target ini bisa tercapai di tahun ini," ujar Handi, Minggu (9/2/2025).

Berdasarkan data Bapenda Kota Malang, pada Januari 2025, realisasi pendapatan dari opsen PKB telah mencapai Rp 9,4 miliar dan opsen BBNKB sebesar Rp 4 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp 13,4 miliar.

Handi menegaskan, berbagai strategi akan terus dilakukan guna mengejar target pendapatan sebesar Rp 184 miliar dari sektor ini.

"Kami terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan, termasuk dengan sosialisasi kepada RT, RW, lurah, dan camat. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan razia kendaraan yang belum membayar pajak," ungkapnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan pajak daerah Kota Malang pada tahun 2024 berkisar antara Rp 680 miliar hingga Rp 700 miliar, dari target Rp 845 miliar. Handi mengungkapkan hampir semua jenis pajak mencapai target, kecuali pajak hiburan yang meleset jauh dari estimasi.

"Pajak hiburan tidak tercapai karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan potensi aslinya. Potensi pajak hiburan hanya sekitar Rp 10 miliar, sedangkan targetnya mencapai Rp 260 miliar. Jadi, mustahil bisa tercapai karena penetapan angka itu juga untuk

menyeimbangkan anggaran belanja," jelasnya.

Di sisi lain, dalam APBD 2025 ini Pemkot Malang juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,38 triliun, meningkat Rp 22,6 miliar dari tahun sebelumnya. Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan peningkatan PAD ini akan didorong dari berbagai sektor strategis.

"Beberapa sektor yang akan menjadi pengungkit PAD di antaranya retribusi sewa aset milik Pemkot Malang, seperti Stadion Gajayana danGOR Ken Arok beserta seluruh fasilitasnya," kata Iwan.

Selain itu, pajak daerah juga menjadi andalan, termasuk pajak hotel, restoran, reklame, kendaraan bermotor, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Kami juga di tahun ini akan lebih mendorong, berupaya memaksimalkan kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda Tugu Tirta dan Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas)," pungkasnya. (Santi/Dya)

# Netanyahu Picu Kontroversi: Usul Negara Palestina Didirikan di Arab Saudi



Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Capitol di Washington, Kamis, 6 Februari 2025. (Foto AP)

**ABU DHABI** - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi dengan mengusulkan agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Namun, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dengan tegas mengancam pernyataan tersebut.

Dikutip Aljazeera, Minggu, (9/2/2025), Netanyahu bicara kepada wartawan dan menyarankan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Saudi secara tegas menolak saran Netanyahu.

Kemlu Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

"Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya," katanya.

Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

"Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara," kata Sekretaris Jenderal Jassem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

Lalu dia juga memperbarui

seruannya kepada masyarakat internasional untuk bersikap serius dan tegas terhadap pernyataan agresif Netanyahu itu. Menurutnya pernyataan itu menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan.

## Penolakan UEA

Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu (8/2/2025) mengancam keras pernyataan yang dilontarkan oleh kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu, yang mengusulkan negara Palestina dapat didirikan di wilayah Arab Saudi.

WAM, kantor berita resmi UEA, melaporkan negara tersebut mengeluarkan "kecaman dan kutukan keras" terhadap pernyataan Netanyahu yang "tidak dapat diterima dan provokatif," serta menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."

Menteri Luar Negeri UEA Khalifa Bin Shaheen Almarar menegaskan kembali solidaritas negaranya yang tak tergoyahkan dengan Arab Saudi, serta menekankan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Arab Saudi.

Dia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap tindakan apa pun yang merongrong hak-hak rakyat Palestina atau memaksa relokasi mereka. Menteri tersebut menyerukan penghentian segera aktivitas pemukiman, seraya memperingatkan tindakan semacam itu membahayakan stabilitas regional dan menghalangi prospek perdamaian.

Almarar lebih lanjut mendesak komunitas internasional, termasuk

## Sejarah Konflik Palestina-Israel



**1799-1946:** Napoleon Bonaparte membuat janji palsu kepada Yahudi pada 1799 untuk memperkuat kekuasaan Prancis. Gerakan Zionis (1882-1896) dan Deklarasi Balfour (1917) memicu protes Palestina terhadap pembentukan negara Yahudi.



**1947-1949:** PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina pada 1947, namun ditolak Palestina. Perang 1948 terjadi, dan Israel menguasai sekitar 80% wilayah Palestina pada 1949.



**1950-1967:** Setelah perang 1948, warga Palestina di Israel diberikan kewarganegaraan. PLO didirikan pada 1964, dan Israel memperkuat kendali militernya atas wilayah Palestina pada 1967.



**1968-1992:** Pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza memicu ketegangan dan Intifadah Pertama (1987-1992) dengan ribuan korban.



**1993-sekarang:** Kesepakatan Oslo (1993) memberikan otonomi terbatas bagi Palestina, namun penentangan dari Hamas dan kelompok lainnya terus memicu konflik.

PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang melanggar hukum internasional. Dia menekankan komitmen historis UEA dalam membela hak-hak rakyat Palestina serta menekankan perlunya solusi politik yang mengarah pada terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

"Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara," tutur Almarar.

Komentar Netanyahu, yang disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, mengusulkan "orang-orang Saudi bisa mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak lahan di sana."

Ketika ditanya apakah pembentukan negara Palestina merupakan prasyarat untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Netanyahu menjawab, "Saya tidak akan menandatangani perjanjian yang membahayakan Israel."

Pernyataan-pernyataan itu muncul saat Arab Saudi terus bersikeras bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina. (Xinhua, ist/nei)



Warga Palestina membeli barang-barang di pasar darurat yang didirikan di tengah kerusakan luas yang disebabkan oleh serangan darat dan udara militer Israel di kamp pengungsi Jabalya di Kota Gaza, 7 Februari 2025. (AP)

# Hobi Nonton Maraton? Waspada Dampaknya!



**MENURUT** Dr. Rajiv Mehta, wakil kepala departemen psikiatri di Rumah Sakit Sir Ganga Ram, India, kebiasaan menonton film atau serial drama secara maraton hingga kehilangan waktu kesadaran dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Sebagaimana dikutip dalam siaran Hindustan Times pada Kamis (6/2/2025), dia mengemukakan bahwa kemudahan mengakses tayangan melalui platform digital membuat orang susah berhenti menonton, terus tergoda menunda dengan "beberapa menit lagi" atau "satu episode lagi".

"Tayangan-tayangan dibuat sedemikian rupa sehingga berakhir dengan keadaan yang membuat penasaran dan penonton tidak ingin menunggu lebih lama untuk memecahkan teka-teki itu, terutama ketika episode berikutnya tersedia dengan mudah, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menonton lebih lanjut," kata dokter Mehta.

Dia menyampaikan bahwa menonton tayangan secara maraton memberikan aliran dopamin terus menerus, membuat penonton merasa senang dan memperkuat perilaku tersebut.

"Bagi sebagian orang, menonton secara maraton merupakan metode untuk melepaskan diri dari stres, kebosanan, emosi yang tidak diinginkan, atau melupakan masalah. Terkadang seseorang menonton

karena tekanan teman sebaya dan untuk validasi sosial," katanya.

Dokter Mehta menyampaikan bahwa kebiasaan menonton secara maraton dapat disamakan dengan kecanduan jangka pendek, yang bisa menghambat kehidupan pribadi, sosial, dan pekerjaan.

Menurut dia, kebiasaan ini bisa memunculkan dampak buruk bagi kesehatan, antara lain karena memicu gaya hidup yang tidak banyak bergerak. "Dampaknya bergantung pada durasi, frekuensi, dan intensitas menonton secara maraton. Hal ini dapat berdampak serius pada kesehatan, hubungan, dan pekerjaan," katanya.

"Begadang dapat memengaruhi pola tidur Anda, dengan konsekuensi lebih lanjut seperti kelelahan, gangguan fungsi kognitif, gangguan suasana hati, kecelakaan, dan kinerja yang buruk," ia menambahkan.

Menonton secara maraton menyita sebagian besar waktu, membuat orang kehilangan waktu untuk melakukan aktivitas yang sehat seperti berolahraga atau tidur tepat waktu. Kondisi yang demikian, menurut dokter Mehta dapat memicu obesitas, nyeri sendi, serta risiko diabetes dan penyakit kardiovaskular.

Ia menyampaikan bahwa kebiasaan menonton secara maraton juga bisa berpengaruh pada kehidupan sosial, memicu masalah keluarga dan isolasi sosial.

"Masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan merupakan penyebab dan akibat dari kebiasaan menonton berlebihan," katanya.

## Dampak buruk bagi kesehatan fisik.

### Nyeri Sendi atau Nyeri Punggung

Kondisi fisik mungkin dapat terganggu akibat kebiasaan menonton film atau serial drama secara maraton. Posisi tubuh yang salah ketika sedang menonton dapat menyebabkan tulang belakang menjadi bermasalah dan berujung pada nyeri punggung.

### Risiko Penyakit Jantung

Kekurangan aktivitas fisik akibat kecanduan nonton film juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Selain itu, juga dapat menyebabkan lingkaran pinggang yang membesar. Apalagi saat menonton sambil mengonsumsi camilan seperti junk food.

### Dampak Buruk Terhadap Mata

Pengaruh buruk utama dari menatap layar televisi atau gadget adalah kesehatan mata karena mata tidak terlepas dari layar televisi atau gadget secara terus menerus.

#### 1. Iritasi Mata

Saat menatap layar, apalagi dalam waktu yang lama, jumlah kedipan mata

biasanya berkurang secara signifikan. Hal ini bisa menyebabkan mata kering dan iritasi. Diketahui, kedipan mata berfungsi untuk menyebarkan air mata secara merata di permukaan mata dan menjaga kelembaban sehingga jika jarang berkedip, permukaan mata menjadi kering atau bisa iritasi.

#### 2. Sindrom Penglihatan Komputer

Menonton film atau serial drama dalam waktu yang lama, terutama dari jarak yang sangat dekat, dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya meliputi; mata lelah, pandangan kabur, mata kering; sakit kepala, nyeri leher dan bahu.

Kondisi ini terjadi karena mata dipaksa untuk fokus pada objek yang sama dalam waktu lama, terutama jika layar berada terlalu dekat. Sinar biru yang dipancarkan oleh layar digital juga dapat memperparah kondisi ini.

#### 3. Rabun Jauh (Myopia)

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dan jarak dekat dengan layar dapat memicu peningkatan risiko rabun jauh.

Sementara itu, dilansir dari laman Klikdokter, kebiasaan nonton film maraton dalam satu waktu akan berdampak bagi kesehatan mental, berikut beberapa bahayanya: (nei,ist/dya)

# Google & Microsoft Ubah SaaS Pendidikan, Sekolah Harus Siap!

**PERKEMBANGAN** teknologi telah memungkinkan lembaga pendidikan meningkatkan efisiensi operasional dan kegiatan pembelajaran melalui penggunaan layanan SaaS.

Software as a Service (SaaS) adalah model penyediaan perangkat lunak yang di hosting oleh penyedia layanan di server mereka, dan pengguna dapat mengaksesnya melalui web browser atau interface khusus yang disediakan. Kelebihan dari model ini adalah pengguna tidak perlu khawatir tentang instalasi, pemeliharaan atau pembaruan perangkat lunak, karena semuanya ditangani oleh penyedia layanan.

Namun, perubahan besar dari penyedia SaaS global mengharuskan institusi pendidikan untuk mengevaluasi kembali strategi teknologi mereka. Setelah Google mengakhiri penyimpanan gratis tanpa batas pada 2022, kini Microsoft mengumumkan pembaruan signifikan pada layanan edukasinya.

Mulai Januari 2025, Microsoft telah melakukan perubahan pada paket Microsoft 365 Education, termasuk penghentian Office 365 A1 Plus, pembatasan penyimpanan hanya 100TB per tenant, serta penyesuaian lisensi yang membatasi penggunaan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint hanya dalam versi web.

Ini akan memaksa banyak institusi pendidikan untuk beralih ke paket berbayar yang lebih mahal atau mengalokasikan kembali sumber daya untuk mempertahankan



fungsionalitasnya. Tak hanya itu, ada juga isu seputar risiko privasi dan kepatuhan terkait data-data sensitif mulai dari catatan akademik siswa, informasi keuangan, hingga riset penting.

Keamanan juga menjadi salah satu perhatian dengan hampir 80% institusi pendidikan menjadi target serangan siber setiap tahunnya, menurut data Netwrix pada 2024. Selain itu, regulasi seperti FERPA dan GDPR mewajibkan pengelolaan data yang aman, privat, dan dapat diaudit—persyaratan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh layanan SaaS.

## Solusi On-Premise

Sebagai solusi, banyak sekolah kini mulai mempertimbangkan pendekatan on-premise untuk sistem produktivitas mereka. Dibandingkan

dengan SaaS yang rawan kenaikan harga langganan dan perubahan fitur tanpa pemberitahuan, solusi on-premise menawarkan stabilitas jangka panjang, biaya yang lebih terprediksi, serta skalabilitas penyimpanan yang fleksibel.

Dengan data yang disimpan secara lokal, sekolah juga dapat memastikan perlindungan privasi yang lebih baik sekaligus mematuhi standar kepatuhan yang berlaku. Misalnya sistem on-premise Synology Office Suite dari Synology yang dirancang untuk mendukung penggunaan di lingkungan institusi pendidikan.

Selain itu, bagi administrator IT, solusi ini juga menyederhanakan pengelolaan sistem dengan antarmuka terpusat, yang memudahkan

Salah satu solusi on-premise yang dirancang untuk mendukung kolaborasi di lingkungan pendidikan

adalah Synology Office Suite. Dengan fitur penyimpanan file yang aman, pengaturan izin berbagi yang fleksibel, pengeditan dokumen secara real-time, serta sistem komunikasi instan, solusi ini membantu sekolah meningkatkan efisiensi dalam manajemen akademik. Baik untuk proyek kelompok siswa maupun pengelolaan dokumen bagi staf pengajar, Synology Office Suite menghadirkan ekosistem yang mendukung produktivitas tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga.

Bagi administrator IT, solusi ini menyederhanakan pengelolaan sistem dengan antarmuka terpusat, pemantauan kesehatan perangkat, serta alat audit untuk memastikan kepatuhan. Kontrol akses tingkat lanjut juga memungkinkan delegasi tugas yang lebih efisien di dalam tim IT, menjaga keamanan dan kelancaran operasional secara menyeluruh.

Meskipun perubahan dari penyedia SaaS besar dapat mengganggu operasional institusi pendidikan dalam jangka pendek, ini juga membuka peluang bagi institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem yang lebih aman, hemat biaya, dan berkelanjutan. Dengan beralih ke solusi produktivitas on-premise, institusi pendidikan dapat membangun fondasi digital yang lebih kuat, mendukung kebutuhan pengajar dan siswa dalam jangka panjang, serta memastikan keamanan dan kendali penuh atas data mereka. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

**MEDIA TERVERIFIKASI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Outfit Check ala Jennie BLACKPINK, Selalu Stylish!

**JENNIE** Blackpink merupakan salah satu member girlgroup terbesar asal Korea Selatan, Blackpink. Di atas panggung, Jennie sering menampilkan tampilan yang bold ala penyanyi hiphop.

Namun, Jennie ternyata dikenal dengan outfit-nya yang kekinian dan juga stylish di luar panggung. Jennie beberapa kali menjadi trendsetter di dunia fashion.

Berikut adalah beberapa outfit Jennie yang bisa diterapkan di outfit-mu!

## Kemeja dan Rok Berwarna Terang

Di Instagram pribadinya, Jennie kerap kali menggunakan rok panjang dengan atasan lengan panjang pula. Outfit pertama ini adalah Jennie menggunakan kaus press-body berwarna putih yang dipadukan dengan rok berwarna putih juga.

Untuk Sahabat Fimela yang beragama Islam, Sahabat Fimela dapat recreate outfit Jennie dengan menambahkan kemeja berwarna cerah sebagai atasan. Sahabat Fimela dapat pilih kemeja dengan warna pastel agar terlihat lebih hidup dan manis.

## Crop Blazer dan Celana Panjang

Sebagai salah satu brand ambassador Chanel, Jennie kerap kali menggunakan crop blazer dengan ala Chanel. Sahabat Fimela dapat meniru gaya Jennie dengan menggunakan crop blazer yang berwarna pastel terang dan kaus di bagian dalam.

Agar tampilannya lebih kasual, padukan crop blazer dengan celana bermotif lurik. Celana bermotif lurik akan menambah kesan kasual, tidak terlalu formal, dan ?? Setelan seperti ini dapat digunakan di kegiatan santai seperti saat liburan atau berbelanja. Selain itu, setelan ini juga sangat

muslim friendly.

## Atasan Press Body dengan Rok Span

Setelan selanjutnya adalah setelan bernuansa elegan dan mahal. Kesan elegan dan mahal yang dipancarkan dari setelan ini adalah prinsip minimalism dalam berbusana.

Pada setelan ini, Sahabat Fimela dapat menggunakan atasan press body berwarna hitam dengan rok span berwarna putih. Untuk menambah ornamen, Jennie menggunakan tas yang berwarna cerah sehingga tidak monoton.

## Rok dari Dua Kemeja

Pada November 2024 lalu, Jennie kembali menggemparkan dunia hiburan dengan roknya yang terbuat dari dua kemeja kotak-kotak. Rok ini digunakan Jennie ketika menghadiri konser musisi Korea Selatan, Zico.

Untuk membuat rok ini, Sahabat Fimela dapat menyatukan dua kemeja dengan mengaitkan kancing dari masing-masing kemeja. Bagian kerah kemeja yang terhubung didungsikan sebagai pengikat pinggang. Apabila dirasa terlalu longgar, gunakan sabuk dengan warna senada agar rok tidak mudah turun.

## Sneakers dan Dress

Penggunaan dress panjang atau gaun kerap kali dipadukan dengan flat shoes atau high heels.

Namun, berbeda dengan Jennie Blackpink. Pada setelan ini, Jennie menggunakan sneakers untuk memadukan gaunnya.

## 6. Midi dress plisket

Potret Jennie mengenakan midi dress terlihat dalam unggahannya pada 2019 silam. Ia tampak asik bermain di taman mengenakan midi dress plisket motif floral dipadukan

sandal flat dengan aksen tali spaghetti. Ia juga membiarkan sebagian rambutnya terurai sehingga tampak menawan.

## Midi dress tartan

Perempuan bernama lengkap Jennie Kim ini tampil menawan dan sederhana dengan midi dress tartan abu-ani, dengan sedikit renda di bagian bawah dan tali berbentuk brenda sehingga mengekspos leher jenjangnya.

Namun yang menarik, Jennie memadukan outfit tersebut dengan sneakers hitam dan kaus kaki putih, sehingga tetap memberikan kesan menggemaskan.

## Midi dress hitam

Kali ini dalam salah satu photoshoot, perempuan berusia 28 tahun itu tampak bak penyihir cantik dengan midi dress hitam berbahan chiffon dengan detail bunga mawar putih di bagian dada.

Ia juga memadukan outfitnya dengan flat shoes hitam dan mengenakan aksesoris kalung hitam, serta membiarkan rambut coklatnya digerai.

## Midi dress hijau sage

Dalam potretnya di 2020 lalu, perempuan kelahiran Cheongdam-dong, 16 Januari 1996

ini tampil anggun bermain di taman dengan outfit midi dress hijau sage lengan pendek, dengan kerah membentuk V-neck. Gaun ini juga memberikan detail pita di bagian pinggang depan. Jennie semakin manis, karena memadukan outfitnya dengan tas rotan abu-abu dan sneakers putih yang membuatnya tetap nyaman berjalan di bebatuan. (nei,ist/dya)



## Gonta Ganti ... (dari Hal 1)

**MAYOR** Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya baru saja diangkat menjadi Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pengangkatan tersebut tertuang dalam surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Sementara itu, posisi Direktur Keuangan yang sebelumnya diisi oleh Iryanto Hutagaol kini ditempati oleh Hendra Susanto.

Mayjen TNI Novi mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan dirinya untuk membantu mempercepat pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

Dalam hal ini ialah Bulog dapat membeli harga gabah petani Rp 6.500/kg dan juga dapat menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025.

"Tidak ada (tugas khusus), tapi kita harus mencapai target ke depan 3 juta ton beras," katanya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Mayjen TNI Novi menyampaikan, dalam pelaksanaan tugas tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dan Polri yang berada di wilayah-wilayah terkait dengan pengawasan dan penyalurannya agar program yang telah ditetapkan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Hingga saat ini Bulog telah menyerap 45.000 ton beras dalam negeri.

"Apa yang menjadi sasaran itu akan kita laksanakan di lapangan dan InsyaAllah 3 bulan kurang lebih ke depan target (penyerapan beras) 3 juta ton beras itu kita harus optimis bisa kita dapatkan," katanya.

Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Novi Helmy Prasetya membenarkan statusnya sebagai prajurit aktif meski telah resmi menjabat Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. "Ya masih aktif (prajurit)," ujar Novi.

Sebelum Novi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marga Taufiq sudah lebih dulu menduduki jabatan direksi sebagai wakil direktur utama. Ia diresmikan bersamaan dengan Dirut sebelumnya pada 10 September 2024. Marga merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memiliki keahlian di bidang infanteri. Jabatan terakhirnya sebelum purna adalah sebagai Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat serta Pejabat Ahli Kepala Staf Angkatan Darat Tingkat III Bidang Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, dan Narkoba.

Pada saat kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden 2024 lalu, Marga terlibat menjadi Ketua Tim Pembina Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di

Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dikutip dari laman resmi Bulog, purnawirawan TNI yang juga menduduki jabatan strategis adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Arifin Seman. Arifin ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Bulog terhitung sejak 17 Juli 2024.

Seperti Marga, Arifin juga pernah menjadi tim kampanye Prabowo saat maju sebagai calon presiden pada 2019 silam. Saat itu, Arifin tercatat sebagai Direktur Monitoring, Analisa, dan Advokasi Tim Pemenangan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno. Arifin juga merupakan Dewan Pembina Partai Gerindra. Karir militer mengantarnya menjadi Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) pada 2009-2010. Dia juga pernah menjadi Tenaga Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.

Kemudian, purnawirawan TNI selanjutnya yang menjabat di Bulog adalah Inspektur Jenderal (Purn) Andi Geerhan Lantara. Andi menjabat sebagai Dewan Pengawas Independen Perum Bulog terhitung sejak 17 Juli 2024. Karir militer Andi dimulai sejak 1978 setelah lulus dari sekolah AKABRI. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad dan juga Panglima Kodam XII/Tanjungpura.

### Sudah 4 Kali Ganti

Diketahui, sejak Erick duduk di Kementerian BUMN, sudah beberapa kali Dirut Bulog diganti. Saat awal mengurus perusahaan pelat merah pada 2019, Dirut Bulog dijabat oleh Budi Waseso.

Sosok yang akrab disapa Buwas tersebut menjabat sebagai Dirut Bulog dari 27 April 2018 sampai 1 Desember 2023. Sebelum menjadi Dirut Bulog, Buwas merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi di Polri.

Buwas diangkat menjadi Dirut Bulog oleh Menteri BUMN Rini Soemarno lewat Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Pada 1 Desember 2023, Erick mencopot Buwas dari posisi Dirut Bulog dan menggantikannya dengan Bayu Krisnamurthi. Bayu memiliki latar belakang sebagai Guru Besar Institut Pertanian Bogor dan Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).

Meski demikian, Bayu saat itu bukanlah orang baru di Bulog. Di era Buwas, Bayu merupakan Ketua Dewan Pengawas Bulog. Belum genap setahun menjabat, Bayu dicopot Erick dan digantikan oleh Wahyu

Suparyono pada 10 September 2024.

Wahyu merupakan mantan Direktur Utama ASABRI yang juga memiliki perjalanan karier cukup lama di BUMN. Ia tercatat pernah menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) Bulog, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, sampai Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Umur Wahyu sebagai Dirut Bulog cukup pendek. Erick kembali melakukan pergantian direksi Bulog pada 7 Februari 2025. Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025, Wahyu digantikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Dengan begitu, Wahyu menjadi Dirut Bulog yang diangkat Erick dengan masa jabatan terpendek yakni hanya lima bulan.

Selain Wahyu, pada perombakan kali ini Erick juga memberhentikan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog yang saat ini digantikan oleh Hendra Susanto..

"Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat, dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto," ungkap Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, A Widiarso.

### Diambil Dana Bansos Beras

Perum Bulog memerlukan anggaran paling sedikit Rp 57 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap beras hingga April 2025 untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Karena target naik dari 2 juta menjadi 3 juta ton setara beras.

Salah satu strategi pemerintah yaitu menghentikan sementara bantuan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sedianya disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2025. Anggaran bantuan sosial sebesar Rp 16,6 triliun itu dialihkan kepada Perum Bulog.

"Cash-nya dipindah ke sana (penyerapan gabah Bulog) oleh Bendahara Umum Negara (BUN) supaya bisa beli gabahnya Rp 6.500 per kilogram," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi Jumat (7/2/2025).

Eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini menjelaskan, bantuan beras tak ikut dipangkas oleh kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, anggaran

program itu termasuk dalam Bagian Anggaran BUN (BA BUN). Tapi program itu tetap harus ditunda karena penyerapan gabah dinilai lebih penting.

Kebijakan penundaan bantuan pangan beras dan SPHP diambil dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan pada Jumat, 31 Januari 2025 lalu. Arief menindaklanjuti hasil rapat dengan mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 pada Kamis, 6 Februari 2025.

Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300 ribu ton, sampai 6 Februari telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen. Sementara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di pedagang eceran tembus Rp14.668 per kilogram pada Januari 2025. Rata-rata harga beras secara nasional naik dibandingkan bulan sebelumnya.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan bahwa rata-rata harga beras di pedagang eceran kembali naik tipis, yakni sebesar 0,36% secara bulanan (month-to-month/mtm). Adapun pada Desember 2024, rata-rata harga beras di pedagang eceran dibanderol Rp14.616 per kilogram. Jika dibandingkan secara tahunan (year-on-year/yoy), BPS juga mencatat rata-rata harga beras secara nasional di pedagang eceran naik 2,29%.

Bukan hanya di pedagang eceran, Amalia menyampaikan bahwa inflasi beras juga terjadi di tingkat grosir baik secara bulanan maupun tahunan. "Di tingkat grosir, terjadi inflasi [beras] sebesar 0,56% mtm dan 1,11% yoy. Di tingkat eceran terjadi inflasi 0,36% mtm dan 2,29% yoy," kata Amalia dalam Rilis BPS.

Untuk di tingkat grosir, BPS mencatat rata-rata harga beras dibanderol Rp13.561 per kilogram pada Januari 2025. Harganya naik tipis 0,56% mtm dari sebelumnya Rp13.485 per kilogram pada Desember tahun lalu. Begitu pula secara tahunan, inflasi beras di tingkat grosir berada di level 1,11%.

Sementara itu, rata-rata harga beras di penggilingan juga terpantau naik 0,92% mtm dari Rp12.679 per kilogram pada Desember 2024 menjadi Rp12.796 per kilogram di awal tahun ini. Namun jika dibandingkan secara tahunan, secara nasional harga beras di tingkat penggilingan turun sebesar 4,3%. Adapun, Amalia menjelaskan bahwa rata-rata harga beras yang disajikan BPS mencakup berbagai jenis kualitas di Indonesia. (din, wid, ant ist/dya)



# Selaraskan dengan Pusat, DPRD Surabaya Sebut Anggaran MBG Bisa untuk Perbaiki Fasilitas Sekolah



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya. (Dok)

**SURABAYA-** Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat.

Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pada seluruh sekolah agar mengalokasikan anggaran daerah khusus MBG untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Terkait anggaran dan pelaksanaannya, dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, dewan mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyesuaikan langkah agar selaras dengan arahan pemerintah pusat. Dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, sejak beberapa bulan terakhir, pemkot telah menata anggaran demi kesuksesan MBG. Anggaran yang rencananya bakal dikhususkan dari APBD Kota Surabaya untuk program tersebut sejumlah Rp 1,1 triliun.

"Tetapi, info terakhir bahwa MBG

akan memakai anggaran murni APBN. Pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi di beberapa kementerian, anggaran itu dimasukkan dalam program MBG tahun ini," ujar Bahtiyar.

Terkait pemkot yang sudah terlanjur menggeser pos-pos tertentu untuk menyisihkan anggaran MBG dari APBD, Bahtiyar menyarankan agar rencana alokasi dana itu diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sekolah. Baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya.

Terlebih, Prabowo mengimbau langsung agar pelaksanaan MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Sebab hal itu menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Prabowo juga memberi atensi pada fasilitas toilet di sekolah-sekolah agar senantiasa bersih dan nyaman.

"Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa Pemda atau Pemkot hanya melakukan pendataan saja. Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada juknis resmi dari pemerintah pusat. Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan

anggaran khusus untuk MBG," tutur Bahtiyar.

## Bisa Dipakai Pembangunan Mendesak

Total dana alokasi khusus MBG dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp 1,1 triliun. Dana tersebut merupakan hasil pengeseran dari beberapa sektor. Rencananya, anggaran MBG itu untuk mendanai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memanfaatkan UMKM setempat untuk memesan makanan. Sehingga terjadi perputaran ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, adanya instruksi presiden untuk sentralisasi dana dan pelaksanaan MBG oleh BGN membuat dana Rp 1,1 triliun tersebut harus dialokasikan ke sektor lain. Bahtiyar menyebut, dana itu bisa dialihkan ke program pembangunan Kota Pahlawan yang lebih mendesak.

"Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir," ujar Bahtiyar.

Politikus Gerindra itu juga mengatakan, perlu adanya pe-

nambahan vendor penyedia makanan program MBG. Saat ini, tercatat dua vendor mitra BGN di Rungkut dan Wonocolo. Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG.

"Akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, kedepan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat," pungkas Bahtiyar. (Adv, ama/dya)



Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir."

**BAHTIYAR RIFAI**  
Wakil Ketua DPRD  
Kota Surabaya